



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOSHI FUTAKI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 400035

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/240 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 1.404 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/38 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 88.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA TYPE E Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, WARISAN Rp. 2.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZIO YAMAHA/ BEJ-CA/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 133.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.601.300.000

III. HUTANG Rp. 235.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.366.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.